

Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang

The Influence of Macro Variables to the Regional Revenue in Semarang City Period 2000-2009

ENI ARYANTI
IIN INDARTI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALA
Jln. Sriwijaya No. 32 & 36 Semarang
Email : indarti@widyamanggala.ac.id

***Abstract:** Decentralization has been playing an important role in realizing regional autonomy success. To ensure the steady implementation of regional autonomy, and overcome problems like poverty and income distribution gap need efforts to improve its own financial capacity that is through increased local revenue. This study reveals how much the influence of macro variables (region gross domestic product, and the inflation rate) to the Local Revenue (PAD) in Semarang City in 2000-2009. This research was quantitative research that used secondary data i.e. physical and documentary data, which focus on examining the financial data Semarang period of 2000-2009. The method of analysis in this research used the influence examination done by examining the effects of independent variables to the dependent variable. The analysis used in the research was quantitative analysis by classic assumption test and multiple linear regression test. Based on the examination and discussion, it can be concluded that the results of multiple linear regression test between macroeconomic variables which consists of the region gross domestic product (x_1) and inflation (x_2), which is the independent variable either simultaneously (F test) significantly influenced the PAD (Y) and partially (t test) regional gross domestic product had a significant influence, while inflation partially (t test) had no influence on PAD (Y) in Semarang City in 2000-2009.*

***Keywords:** Region Gross Domestic Product, Inflation Rate, Local Revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Setiap daerah di Indonesia harus siap menghadapi reformasi pemerintahan berupa otonomi daerah, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksanaannya. Pemerintah pusat sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah bertanggung jawab agar otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Dalam UU RI Nomor 32 tahun 2004 mengungkapkan bahwa desentralisasi adalah

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut bertujuan untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban dan tidak perlu menangani urusan domestik, dengan itu diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, daerah otonom akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Hal tersebut yang digunakan sebagai dasar kebijakan otonomi daerah (Haris, 2005 : 8).

Dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah; Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berisi satu paket kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Selain itu Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, BPK, dan MA yang merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar melakukan perubahan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut mengharuskan tiap daerah untuk mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka memperdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terasa sangat penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.

Penelitian yang berjudul “ Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara “ oleh Simanjuntak dalam Halim (2001 : 101) mengemukakan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan.

Variabel yang dapat dikendalikan yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri, antara lain kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan

PAD, pengadaan pembangunan baru, mencari sumber pendapatan baru, perubahan peraturan, dan penyesuaian tarif. Sedangkan variabel yang tidak dapat dikendalikan yaitu perkembangan PDRB perkapita riil, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh variabel makro terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dengan menggunakan teori dari penelitian Simanjuntak dalam Halim (2001). Alasan penulis meneliti Kota Semarang karena kota ini memiliki sumber daya alam yang dapat mendukung sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu prioritas pembangunan penggerak ekonomi masyarakat. Diharapkan melalui industri dan perdagangan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar, maka akan berdampak pada sektor-sektor yang lain yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah di Kota Semarang akan lebih jelas jika melihat variabel makro seperti Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, inflasi. Sehubungan dengan itu maka muncul pertanyaan apakah perkembangan variabel makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sejauh mana respon perkembangan variabel makro terhadap penerimaan PAD di Kota Semarang. Sehingga penelitian ini diberi judul, **”Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang Periode Tahun 2000- 2009”**.

Perumusan Masalah.

Potensi ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro antara lain adalah PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi. Sedangkan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh variabel makro terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dirinci sebagai berikut:

- 1 Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang tahun 2000-2009 ?
- 2 Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang tahun 2000-2009 ?
- 3 Apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang tahun 2000-2009 ?
- 4 Apakah variabel makro (Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk dan tingkat inflasi) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang tahun 2000-2009 ?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel makro seperti Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, tingkat inflasi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang periode tahun 2000-2009.

TINJAUAN TEORETIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Simanjuntak dalam Halim (2001:103) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Variable Makro. Dalam kaitannya dengan variabel makro, maka perlu dijelaskan definisi dari variabel makro itu sendiri. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2006 : 115). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007, 1258), variabel adalah sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan, satuan bahasa yang paling terpengaruh oleh variasi sosial dan stilistik. Makro ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku perekonomian secara

keseluruhan (Samuelson dan Nordhaus, 1995:77). Pendekatan makro adalah pengamatan kegiatan antar orang atau kelompok, baik yang berlingkup regional, nasional maupun internasional yang memiliki keterkaitan satu sama lain (Widodo, 1990 : 11). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel makro adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan bidang ekonomi baik dari lingkup regional, nasional maupun internasional. Variabel makro yang digunakan :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah regional atau propinsi selama kurun waktu satu tahun (Purnastuti dan Mustikawati, 2007:113). Sedangkan Simanjuntak dalam Halim (2001:103) mengemukakan PDRB sebagai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam suatu daerah tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu dan dalam jangka waktu satu tahun.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Besarnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat (Simanjuntak dalam Halim, 2001).

c. Inflasi

Penelitian Simanjuntak dalam Halim (2001:101) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian, dan ada istilah inflasi merayap yang diartikan sebagai proses kenaikan harga-harga barang yang lambat (Sukirno, 2004:15). Selain itu inflasi juga

didefinisikan sebagai suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Nanga, 2001:241).

Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Rahayu (2005) mengambil data dari laporan keuangan Kota Kediri, dengan populasi semua tahun periode anggaran dan sampel sebanyak 14 tahun yaitu tahun 1989-2002. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa variabel makro yang terdiri dari PDRB, jumlah penduduk dan pengeluaran pembangunan yang merupakan variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Andriani dan Handayani (2008) meneliti PAD di Kabupaten Merangin selama periode 1999-2006. Hasilnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan secara parsial terhadap PAD. Tetapi secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan. PDRB dan jumlah penduduk mempunyai hubungan sangat kuat dengan PAD dan model yang diestimasi adalah tepat. Triani dan Kuntari (2010) meneliti pengaruh variable makro terhadap penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar, hasilnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD mengalami penurunan, namun PDRB selalu meningkat tiap tahunnya. Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh positif, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD. Dan secara simultan variabel makro berpengaruh terhadap PAD.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Santoso dan Rahayu	2005	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri	PDRB (x_1) Jumlah penduduk (x_2) Pengeluaran pembangunan (x_3)	Variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD
2	Andriani dan Handayani	2008	Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin	PDRB (x_1) Jumlah penduduk (x_2)	PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Jumlah penduduk tidak signifikan secara parsial terhadap PAD Secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD
3	Triani dan Kuntari	2010	Pengaruh Variabel Makro terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar	PDRB (x_1) Jumlah penduduk (x_2) Inflasi (x_3)	PDRB berpengaruh negatif terhadap PAD Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD Inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD Variabel makro secara simultan berpengaruh terhadap PAD

Kerangka Teoretis

Dari penelitian diatas muncul suatu kerangka teoretis dalam penelitian ini yang harus dilakukan pengujian berkaitan dengan perkembangan variabel makro yaitu PDRB, jumlah penduduk dan tingkat inflasi terhadap penerimaan PAD khususnya di Kota Semarang. Untuk memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian penelitian ini, maka disusunlah kerangka pemikiran sebagaimana Gambar 1.

Hipotesis

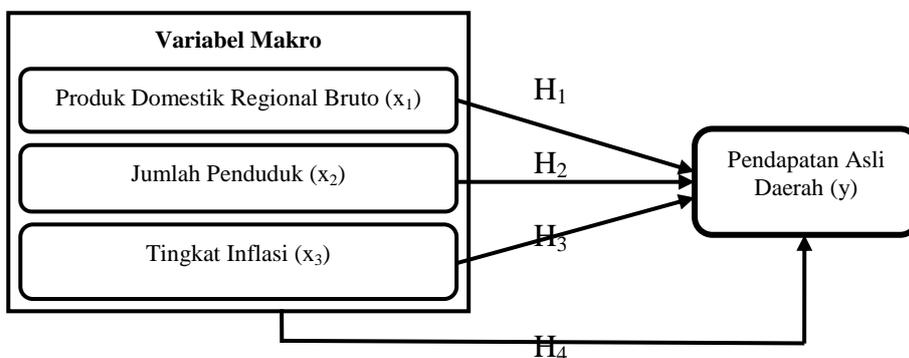
H_1 : Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2000-2009.

H₂ : Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2000-2009.

H₃ : Variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2000-2009.

H₄ : Variabel makro (Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, inflasi) berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2000-2009.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian korelasional / hubungan.

Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih dari sumber ekonomi asli Kota Semarang dan

dihitung dengan rupiah, diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2000-2009.

2. Variabel Makro

Variabel makro adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan bidang ekonomi baik dari lingkup regional, nasional maupun internasional. Variabel makro yang digunakan seperti :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di Kota Semarang atas dasar harga konstan tahun 2000 dihitung dengan rupiah, data diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2000-2009.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk didefinisikan sebagai penghuni atau merupakan semua orang yang mendiami wilayah Kota Semarang dan dihitung per jiwa, data diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2000-2009.

c. Inflasi

Inflasi adalah kejadian apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum di Kota Semarang naik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang yang diukur dengan persentase, data diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2000-2009.

Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini merupakan penelitian populasi, disebut juga studi populasi atau studi sensus karena hanya meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian.

Teknik Pengambilan Sampel.

Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel non probabilitas purposive sampling berdasarkan pertimbangan (judgment sampling). Judgment sampling

merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Adapun pertimbangan tersebut antara lain Kota Semarang memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2000-2009 karena memiliki sektor perdagangan, sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan pariwisata dan memiliki beberapa industri yang dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Namun pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mengalami penurunan karena dipengaruhi kondisi perekonomian global seperti kebijakan pasar bebas

Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber datanya adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara documenter

Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, Analisis kuantitatif yang dilakukana terbagi menjadi dua langkah yaitu: uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, uji autokorelasi serta uji heteroskedastisitas dan uji regresi linier berganda yang terdiri dari uji hepotesis serta koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil analisis regresi linier berganda dapat digambarkan dalam persamaan matematis sebagai berikut:

- $\hat{Y} = PAD = - 9,867 + 0,036 X_1 - 1,350 X_2$
- Dalam penelitian ini terjadi multikolonieritas kuat maka harus diobati dengan cara-cara yang tersedia (Ghozali, 2005:95) namun tidak dapat mengatasinya, sehingga mengambil langkah mengeluarkan variabel jumlah penduduk karena variabel ini mempunyai kolinieritas tinggi. Setelah dihilangkan satu variabelnya maka data yang diolah selanjutnya adalah data awal sebelum ditransformasi.

- Pada uji t, dapat diketahui variabel PDRB secara statistik berpengaruh terhadap penerimaan PAD, dengan hasil t hitung 39,349 dengan tingkat signifikan 0,000 pada alfa 5%. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan (pajak dan retribusi daerah) yang diterapkan oleh pemerintah sehingga meningkatkan penerimaan PAD (Halim, 2001:101). Dengan demikian maka hipotesis H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif antara variabel PDRB dengan PAD di Kota Semarang tahun 2000-2009. Dari hasil tersebut mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriani dan Handayani (2008) yang berjudul “Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin”.
- Berdasarkan uji t, variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD, dengan hasil t hitung -0,443 dengan tingkat signifikan 0,660 pada alfa 5%. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk kepada perekonomian, salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2004:339) maka inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD. Namun dalam penelitian ini inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Semarang tahun 2000-2009. Dengan demikian maka hipotesis H_a diterima berarti tidak ada pengaruh antara variabel inflasi terhadap PAD di Kota Semarang tahun 2000-2009. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Triani dan Kuntari (2010) yang berjudul “Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar”.
- Berdasarkan uji F, maka dapat diketahui bahwa variabel PDRB dan inflasi ternyata memiliki pengaruh terhadap PAD. Kondisi ini dibuktikan dengan uji F yang menghasilkan nilai F hitung sebesar 817,958 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 pada alfa 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut signifikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen-nya. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Triani dan Kuntari (2010) yang berjudul “Pengaruh Variabel Makro terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar” yang menunjukkan bahwa variabel makro secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi sampel merupakan proporsi dari variasi total Y yang dijelaskan oleh hubungan Y dengan X. Koefisien R^2 sebesar = 0,978 , hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel yang dipengaruhi sebesar 97,8%. Sehingga dalam penelitian ini hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang erat. Dan hanya ada 2,2% variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

SIMPULAN

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi PAD di Kota Semarang pada periode tahun anggaran 2000-2009. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang karena laju inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif yaitu dengan cara penetapan pada tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat flat, meskipun tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan tinggi atau rendah hal ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Karena laju inflasi hanya berguna sebagai pertimbangan perubahan tarif. Kondisi inilah yang menyebabkan variabel Inflasi yang seharusnya berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD, menjadi tidak berpengaruh di Kota Semarang.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji variabel kebijakan dan kelembagaan dari penelitian Simanjuntak dalam Halim (2001) yang belum banyak diteliti sehingga dapat diketahui variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. “*Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*”. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Adriani, Evi dan Sri Indah Handayani. 2008. “*Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin*”. (diunduh dari [www.http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/820816.pdf](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/820816.pdf)).
- Anonim. 2004. *UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Semarang: CV Duta Nusindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2000*.
- _____. 2010. *Indikator Ekonomi Kota Semarang 2010*.
- _____. 2010. *Semarang dalam Angka 2010*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate dengan Proses SPSS. Edisi 3*. Semarang: UNDIP.
- _____. 2006. *Analisis Multivariate dengan Proses SPSS. Edisi 4*. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul. 2001. *Menejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- _____. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Pres.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Kaelan. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Khalwaty, Tajul. 2000. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nanga, Muana. 2001. *Makro Ekonomi. Edisi Perdana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Purnastuti, Losina dan Rr. Indah Mustikawati. 2007. *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta : Grasindo.

- Samuelson, Paul dan William D. Nordhaus. 1995. *Makro Ekonomi. Edisi Keempatbelas*. Jakarta : Erlangga.
- Santoso, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu. 2005. “*Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten Kediri*”. *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2 No. 1 / Juli 2005 : 9-18.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta : YPKP.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cetakan Ke limabelas. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Cetakan Ke limabelas. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Triani dan Yeni Kuntari. 2010. “*Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*”. *ASET Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 12 No. 1 / Maret 2010 : 87-94.
- Ulum MD, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : UMM Press.
- Warpani, Suwardjoko. 1980. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung : Penerbit ITB.
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi*. Jakarta : Kanisius.